

BAB I

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD, ayat (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, dan ayat (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Sedangkan dalam Pasal 273 (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

Perencanaan Kantor Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah tidak memadainya kondisi gedung kantor Dinas Sosial yang telah ada untuk mendukung terlaksananya kegiatan pada kantor tersebut, yang timbul dari berbagai hal antara lain: Bangunan di setiap negara harus direalisasikan semaksimal mungkin agar dapat menjalankan fungsi bangunan dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia, Program peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung Negara dan lingkungan yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Sosial dalam hal penyelenggaraan administrasi otentik pemerintahan dan kelembagaan, Dipandang perlu bagi Dinas Sosial Kota Padang Panjang untuk membangun Gedung kantor baru, sehingga kondisi gedung kantor nantinya bisa mendukung terlaksananya kegiatan pada kantor Dinas Sosial.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Rencana Strategi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Rencana Strategi Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Rencana Strategi maupun evaluasi Rencana kerja Perangkat Daerah.

Pemerintah Kota Padang Panjang berupaya membangun kantor Dinas Sosial yang baru karena banyaknya terjadi permasalahan pada kantor tersebut seperti bangunan yang sudah tua dan tidak bisa lagi menambah luas bangunan pada kantor Dinas Sosial dan bangunan penunjang, ruang baru serta infrastruktur yang diperlukan. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat desain kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang dengan pendekatan arsitektur "*Regionalisme*" yang menekankan pada pengungkapan karakteristik suatu daerah/tempat dalam arsitektur kontemporer.

Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang (jiwa)				
2016	2017	2018	2019	2020
51.712 jiwa	52.422 jiwa	52.994 jiwa	53.693 jiwa	54.421 jiwa

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang
Sumber : <http://www.bps.go.id>

Dengan jumlah penduduk Kota Padang Panjang yang terus meningkat tahun demi tahun. Dan wilayah Padang Panjang yang semakin sempit dengan banyaknya jumlah penduduk yang terus berkembang. Maka kota Padang Panjang memerlukan wadah dan wilayah yang signifikan untuk perkembangan fasilitas publik. Dengan 2 kecamatan Padang Panjang Timur dan Padang Panjang Barat. Dengan luas 23 km² daerah Padang Panjang yang tidak bisa diperluas dan dimekarkan lagi, maka perlu wilayah yang kosong untuk meningkatkan perkembangan Kota Padang Panjang dari sektor formal maupun informal. Dan mampu menunjang perkembangan Kota Padang Panjang.

1.1.1 Landasan Hukum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

1.1.2 Instansi Terkait Dengan Dinas Sosial

1.1.2.1 Keluarga Berencana

Salah satu masalah utama penduduk Indonesia adalah kepadatan penduduknya yang sangat tinggi. Ini memunculkan berbagai masalah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan rencana Keluarga Berencana (KB), yaitu rencana pembatasan jumlah anak dua anak per keluarga.

Program Kerja Bidang Keluarga Berencana

- a. Sosialisasi Manfaat Menjadi Peserta KB
- b. Penyuluhan Metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) Keluarga Berencana
- c. Pelayanan Keluarga Berencana Statis :
 - Pelayanan Keluarga Berencana di KKB / Fasilitas Kesehatan
- d. Pelauanan Keluarga berencana Dinamis / Momentum :
 - Pelayanan Keluarga Berencana dalam Rangka HUT RI dan HUT Tulang Bawang
 - Pelayanan Keluarga Berencana di Daerah Legok / GALCITAS
 - Pelayanan Keluarga Berencana dalam Rangka Lomba P#KSS, BKB, Kesrak
 - Pelayanan Keluarga Berencana dalam Rangka HUT TNI/POLRI/IDI/DLL
 - Pelayanan keluarga berencana di kampung KB
- e. Monitoring dan Evaluasi Balai Penyuluh KB di 15 kecamatan
- f. Pengadaan GenRE KIT

(sumber : <http://dppkb.tulangbawangkab.go.id>)

1.1.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai

subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (bahasa Inggris: *beneficiaries*) atau objek saja. (Sumber : <https://id.wikipedia.org>)

1.1.2.3 Dinas Sosial

- a. Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan Dinas;
 - Penyusunan rencana strategik dinas
 - Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang sosial, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan dinas;
 - Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas.

Rincian tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

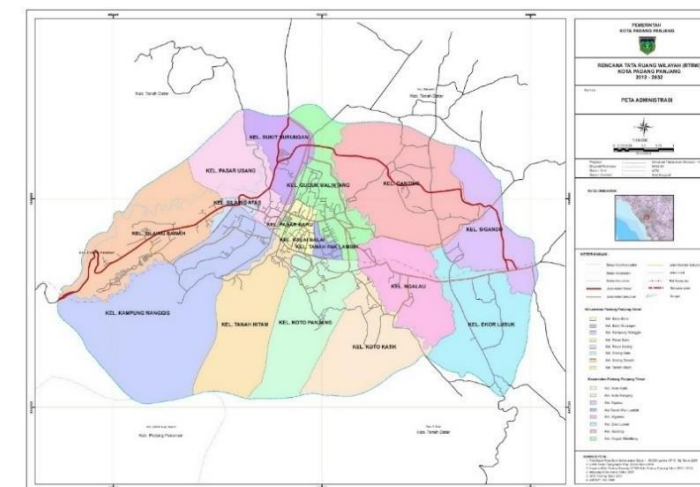
1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan rencana strategik dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi misi daerah;
3. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya;
4. Menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja dinas;
5. Merumuskan kebijaksanaan teknis penyusunan program Pengembangan, pemberdayaan, rehabilitasi, penanggulangan dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial;
 - Mengidentifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten;
 - Mengembangkan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten;
 - Menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten;

- Menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten;
- Menyelenggarakan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten;
- Menyelenggarakan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten;
- Menyelenggarakan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial, kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasian yang meliputi Pembinaan SDM aparatur, pemberdayaan bantuan sosial, penyelenggaraan adm. Kependudukan, penyiapan permukiman dan penempatan, pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten;
- Membina dan mengembangkan karir pegawai serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karier dalam DP-3;
- Membina pelaksanaan Program waskat di lingkungan Dinas;
- Memberi saran dan Pertimbangan Teknis kepada atasan;
- Membina pelaksanaan tugas-tugas unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Mengarahkan pelaksanaan program kerja dinas;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja di lingkungan Dinas;
- Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati.

1.2 DATA

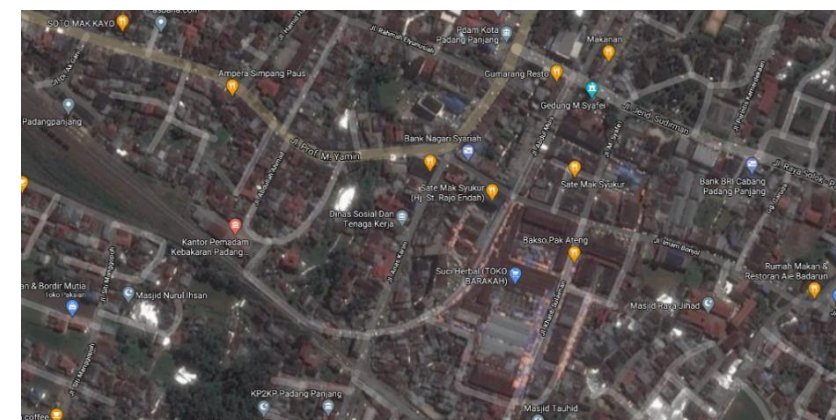
Cakupan pemerintahan Kota Padang Panjang dan wilayah kekuasaan yang di urus oleh wali

kota dan DPRD Kota Padang Panjang terdiri dari 2 kecamatan. Pemindahan kantor ini terletak di Kecamatan Padang Panjang Timur, kelurahan Ngalau dengan luas tanah 8.062 m²

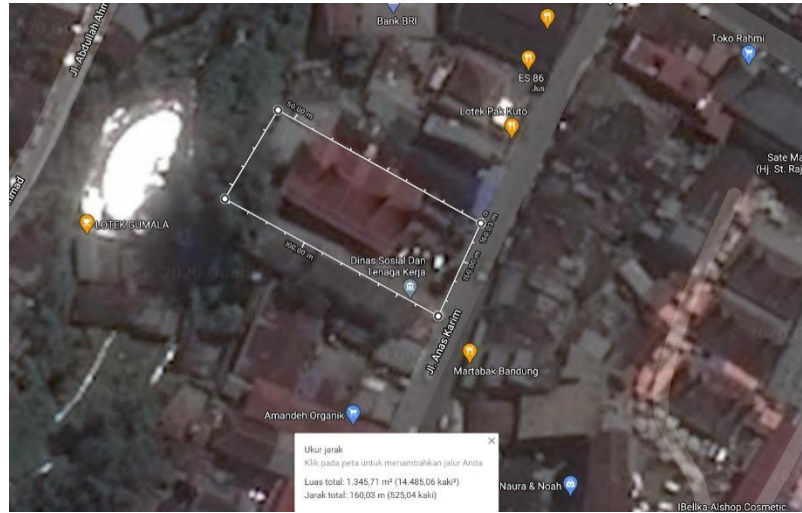


Gambar 1.1 Peta Kota Padang Panjang
Sumber: peta-kota.blogspot.com

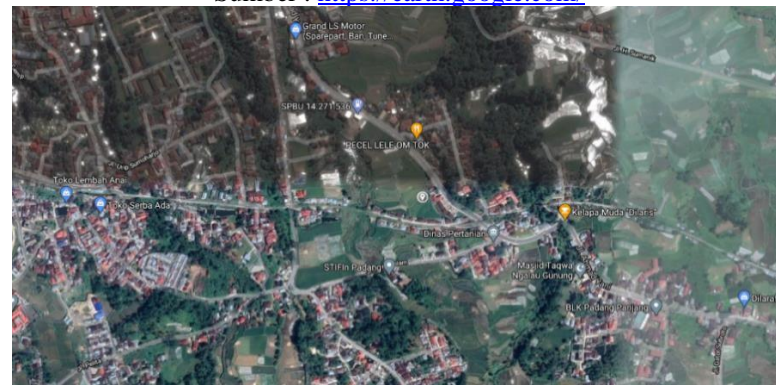
Bangunan Kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang yang berada pada pusat perekonomian Kota Padang Panjang ini merupakan bangunan lama yang terdiri dari satu lantai dan cakupan luas bangunan yang sangat sempit. Pada laporan pelaksanaannya telah ditetapkan bahwasanya pembagunan kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang akan dilaksanakan akan tetapi terkendala dengan masalah keuangan.



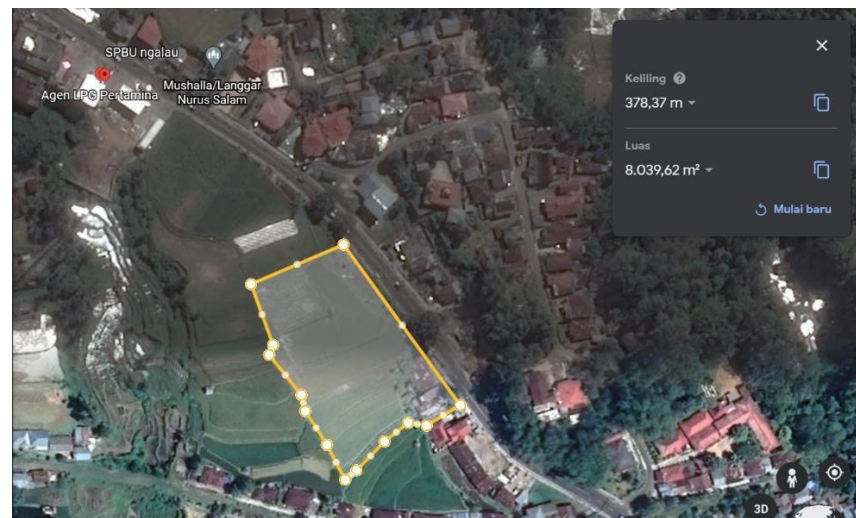
Gambar 1.2 Letak Kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang dengan radius 250m
Sumber : <https://earth.google.com/>



Gambar 1.3 Luas Siteplan pada Kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang saat ini
Luas total : 1.345,71m² (14.485,06 kaki)
Sumber : <https://earth.google.com/>



Gambar 1.4 Radius 250m² Siteplan pada perencanaan Kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang
Sumber : (<https://earth.google.com/>)



Gambar 1.5 Ukuran Siteplan pada site perencanaan Kantor Dinas Sosial yang baru Kota Padang Panjang
Sumber : (<https://earth.google.com/>)



Gambar 1.6 Tampak dari jalan Kawasan yang akan dibangun
Sumber : Dokumen Pribadi
Tabel 1.2

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dalam pengendalian kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan pelayanan sosial perlindungan anak Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

N O	TINGKAT PENDIDIKAN SMP SEDERAJAT	PNS		NON PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	SMP SEDERAJAT	2	-	1	1	4
2	SMA SEDERAJAT	5	5	11	2	23
3	D3	1	3	-	2	6
4	S1	7	11	1	2	21
5	S2	1	-	-	-	1
6	S3	-	-	-	-	-
JUMLAH		16	19	13	7	55
		35		20		

Sumber : Bezzeting Pegawai Tahun 2018-2023

Kota Padang Panjang memiliki 55 pegawai di bidang pelayanan sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk 35 PNS dan 20 non PNS. 35 PNS dari Dinas Sosial, Pengendalian Kependudukan, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, pegawai dengan pendidikan terbanyak adalah pegawai dengan pendidikan S1 sebanyak 18 orang, sementara untuk Pegawai Non PNS pegawai dengan pendidikan terbanyak adalah berpendidikan SMA/ sederajat yaitu sebanyak 13 orang. PNS pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah sebanyak 35 orang yang terdiri dari golongan IV 6 orang, Golongan III 24 orang dan Golongan II 5 orang (Dalam Renstra Dinas Sosial Kota Padang Panjang).

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2018

N O	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1	Golongan II	4	1	5
2	Golongan III	10	14	24
3	Golongan IV	2	4	6
	Jumlah	16	19	35

Sumber : Bezzeting Pegawai Tahun 2019

1.2.1 FAKTA

Fakta dapat kita kenali dari aspek teknis perencanaan dari yang kita tinjau seperti berikut :

1. Lokasi sekarang yang sudah tidak layak

Kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang yang ditempati saat ini sudah berumur cukup tua, tidak lagi kondusif untuk kinerja staf, kekurangan ruang untuk instansi, tidak bisa menambah fungsi ruang yang baru guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat maka dibutuhkan kantor yang baru di wilayah kecamatan Padang Panjang Timur, Kelurahan Ngalau merupakan wilayah yang dijadikan untuk pembangunan perkantoran Dinas Sosial.



Gambar 1.7 Tampak depan bangunan Kantor Dinas Sosial dengan cakupan luas bangunan yang kecil Sumber : <https://www.google.com/>



Gambar 1.8 Ruang yang terdapat pada Lt.1 Kantor Dinas Sosial Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 1.9 Tempat Parkir kendaraan roda dua yang tidak teratur dan berantakan Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 1.10 Lobby atau Tempat melapor pada Kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang
Sumber : Dokumen Pribadi

2. Penentuan Lokasi

- Lokasi Gedung Kantor Dinas Sosial.
- Lokasi Parkir.
- Lokasi sarana dan prasarana bangunan penunjang lainnya.

Yang menjadi prioritas dalam pembangunan ini adalah lokasi Kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang.

3. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Lokasi Gedung Kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang :

a. Faktor Primer

- 1) Luas lahan / kawasan yang digunakan
- 2) Letak lokasi yang dituju
- 3) Transportasi publik
- 4) Sumber energi listrik dan air "utilitas"

b. Faktor Skunder

- 1) Hukum dan peraturan
- 2) Iklim dan tanah
- 3) Ketersediaan tenaga kerja
- 4) Sikap masyarakat setempat
- 5) Kemungkinan perluasan lokasi

4. Pertimbangan Penentuan Lokasi

- 1) Dekat dengan pusat pemerintahan

- 2) Tidak terlalu jauh dengan pusat kota
- 3) Menghindari keramaian masyarakat
- 4) Sarana dan pasarana

5. Metode Penilaian Lokasi

a. Metode Deskriptif

Metode ini bertujuan untuk mengenal bagaimana gambaran tentang gedung DPRD kota Bukittinggi yang lama tujuannya agar memahami bagaimana kelayakan pada gedung DPRD yang lama karna tuntutan fungsi dan kegunaan ruangan gedung DPRD yang semakin hari semakin sempit.

b. Metode Dokumentatif

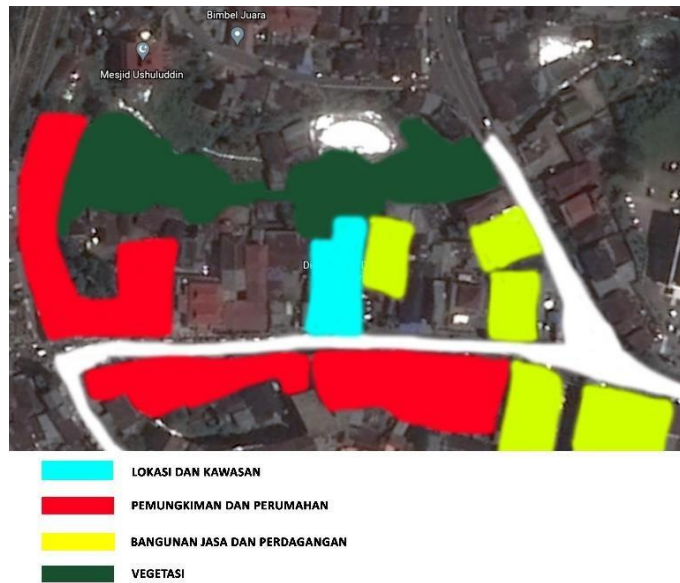
Metode ini bisa berupa permintaan data pada instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian yang saya buat berupa gambar atau file data yang berhubungan dengan kajian masalah tersebut.

c. Metode Komparatif Merupakan perbandingan atau tolak ukur dari sebuah data yang peneliti amati.

6. Luas Kawasan / Lokasi

Luas kawasan pada pembagunan yang akan digunakan seluas 42,587,79 m² . dengan pembagian ke 3 aspek lokasi yang menjadi prioritas pertama lokasi gedung DPRD ,bangunan sarana penunjang dan lokasi parkir.sedangkan luas lokasi sekarang 2.533,34 m² cuman mencakup gedung DPRD dan tidak adanya vasilitas pendukung sekitar kawasan bangunan.

7. Tata Letak Layout Kawasan



Gambar 1.11. Pembagian wilayah pada siteplan Kantor Dinas Sosial
Sumber : Dokumen Pribadi

Bisa dilihat dari layout lokasi bahwasanya gedung Dinas Sosial Kota Padang Panjang tidak baik untuk melaksanakan tugas pemerintahan . Karena lokasi merupakan tempat aktifitas masyarakat dan khalayak ramai.

8. Bahan dan teknologi

Pada Gedung Kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang sekarang ini gedungnya sendiri sudah berumur cukup tua . Pada gedung ini juga telah banyak melakukan renovasi sehingga bahan pada bangunan tersebut sudah tidak asli lagi . Oleh karena itu pemerintah berupaya melakukan perencanaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang yang baru. Dengan penggunaan bahan dan teknologi yang baru untuk memperoleh gedung Kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang yang menunjang segala aktifitas dan pelaksanaan tugas dan wewenang negara.

1.3 RUMUSAN MASALAH

1.3.1 Permasalahan Arsitektural

Bagaimana merencanakan dan merancang gedung Kantor Dinas Sosial dengan konsep pendekatan arsitektur regionalisme yang menekankan karakteristik suatu daerah kedalam bangunan.

Permasalahan Arsitektur pada Kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang:

1. Kondisi pada gedung kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang sudah berumur dan tidak kondusif lagi.
2. Jumlah ketersediaan ruang yang ada di kantor Dinas Sosial terbatas sehingga membutuhkan ruangan baru.
3. Perlunya pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur.
4. Terlalu dekat dengan pusat keramaian, pusat ekonomi.
5. Tidak dapat menambah fungsi baru di kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang.

Bagaimana pembangunan Kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang dengan Standar Kantor diindonesia?

1.3.2. Permasalahan Non Arsitektural

Pada permasalahan Non Arsitektural ini kita harus mengetahui dahulu bagian tugas pokok, fungsi dan administrasi Kantor Dinas Sosial Padang Panjang sendiri diantaranya:

Tugas :

Pelaksanaan pemberdayaan social dan penanganan fakir miskin, pelayanan penanganan dan rehabilitas social, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagaimana peran Kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang terhadap pelayanan masyarakat?

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**



Diagram 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial
Sumber : Renstra Dinas Sosial Kota Padang Panjang

1.4 TUJUAN DAN SARANA

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Tercapainya layanan yang berkualitas kepada masyarakat Kota Padang Panjang
2. Peningkatan kualitas pelayan Dinas Sosial bagi masyarakat Kota Padang Panjang.
3. Tercapainya pelayanan yang lebih optimal.
4. Peningkatan kinerja dan etos kerja karyawan.
5. Menyediakan referensi dan informasi data yang lebih lengkap dan akurat.

1.4.2 Sasaran Penelitian

Sasaran dari penelitian ini adalah instansi pemerintahan terkait serta masyarakat khususnya masyarakat Kota Padang Panjang.

1.5 IDE DAN KEBARUAN

Menjadikan kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang sebagai pelayanan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan masyarakat dan kondisi social masyarakat. Memakai pendekatan arsitektur *regionalisme* dapat menekankan karakteristik suatu daerah terhadap masyarakat Kota Padang Panjang.

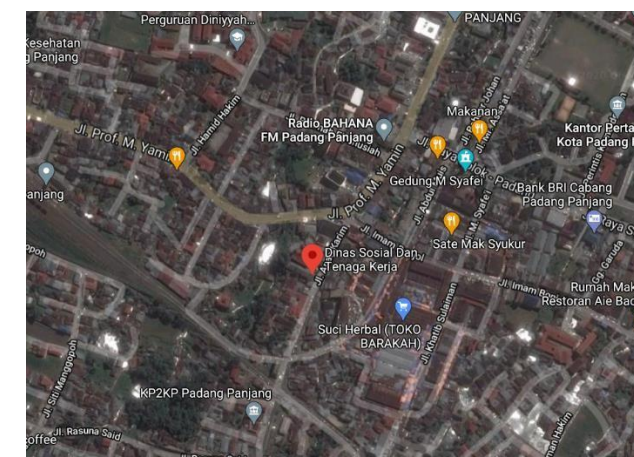
1.6 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

1.5.1 Ruang Lingkup Spasial

Kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang yang terletak di Jl. Anas Karim No. 14 Kelurahan Pasar Usang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat. Pada bangunan Dinas Sosial yang terletak dipusat Kota Padang Panjang. Dengan kondisi tidak memungkinkan lagi untuk menunjang tugas dan menunjang pekerjaan maka pemerintah Kota Padang Panjang berencana memindahkan lokasi gedung kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang dengan cangkupan kawasan yang lebih luas dan masih bisa melakukan pengembangan fungsi lahan. Kantor Dinas Sosial yang baru ini sendiri terletak di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ngalau Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.

Jadi Adapun ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Ngalau
2. Kecamatan Padang Panjang Timur
3. Kota Padang Panjang



Gambar 1.12. Siteplan Kantor Dinas Sosial saat ini

Sumber : googlemaps

1.5.2. Ruang Lingkup Substansial

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memiliki batasan kegiatan dan ruang lingkup kegiatan penilitan yang akan dibahas yaitu:

1. Melakukan survey kelokasi sesuai ruang lingkup perencanaan bangunan.
2. Rumusan masalah yang telah ditetapkan .
3. Menganalisis masalah yang ada pada bangunan / kawasan yang ada dibangun.
4. Menganalisis data yang diperoleh.
5. Perumusan konsep desain untuk perencanaan.

1.7. METODA PEMBAHASAN

1.7.1 Metode Deskriptif

Metode ini bertujuan untuk mengenal bagaimana gambaran tentang gedung kantor Dinas Sosial yang lama bertujuan agar memahami bagaimana kelayakan pada gedung Dinas Sosial yang lama karna tuntutan fungsi dan kegunaan ruang gedung Dinas Sosial yang semakin hari semakin sempit.

1.7.2 Metode Dokumentatif

Metode ini bisa merupakan permintaan data pada instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian yang saya buat berupa gambar atau file data yang berhubungan dengan kajian masalah tersebut.

1.7.3 Metode Komparatif

Merupakan perbandingan atau tolak ukur dari sebuah data yang diamati. Dari sana kita akan mendapatkan sebuah keunggulan dari data yang saya kumpulkan sehingga memperoleh adanya sebuah fakta dan keunggulan untuk melanjutkan penelitian ketahap berikutnya.

1.8 KEASLIAN USULAN JUDUL

Keaslian judul dapat kita lihat dengan adanya masalah pada sebuah bangunan lama dimana kegunaan dan fungsi bangunan Dinas Sosial Kota Padang Panjang tidak efektif lagi untuk melakukan pekerjaan. Dan didorong dengan adanya isu pemindahan gedung kantor Dinas Sosial Kota Padang Panjang kekawasan yang baru.

KARYA TULIS KANTOR DINAS SOSIAL

NO	KANTOR DINAS SOSIAL	NAMA	TAHUN	JUDUL	PEMBAHASAN
1.	DINAS SOSIAL KOTA CIREBON	Siti Naelu Sa'adah Asep Mulyana	2018	PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI RUMAH SINGGAH DUKUH SEMAR KOTA CIREBON	Di Indonesia, fenomena anak jalanan merupakan masalah global, di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, serta kota-kota kecil seperti Cirebon masalah sosial anak jalanan tidak jarang terjadi.
3.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Armando Soares, Ratih Nurpratiwi dan M. Makmur	2015	PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan rencana pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
4.	DINAS SOSIAL KOTA PADANG PANJANG	DINAS SOSIAL	2018	DINAS SOSIAL PENGENDALIA	Kota Padang Panjang bertumpu pada persoalan tanggung jawab dan

		KOTA PADANG PANJANG		N PENDUDUK KB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG	fungsi dinas sosial bidang pelayanan kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
--	--	---------------------	--	--	--

Tabel 1.4. Karya Tulis Kantor Dinas Sosial

KARYA TULIS DISAINE REGIONALISME

NO	DESAIN	NAMA	TAHUN	JUDUL	PEMBAHASAN
1.	HOTEL RESORT DI KAWASAN WISATA MANDEH,	Ryandhika Ruddy Farel	2017	APLIKASI ARSITEKTUR REGIONALISME PADA PERANCANGAN HOTEL RESORT DI KAWASAN WISATA MANDEH, SUMATERA BARAT	Rancangan bangunan hotel resor mengadopsi metode arsitektur kedaerahan yang bertujuan untuk menunjukkan kepada wisatawan ciri-ciri budaya Sumatera Barat dan metode promosi pariwisata di Sumatera Barat, bentuknya yang unik cocok untuk wisatawan. Diharapkan desain hotel resor ini menjadi sesuatu yang unik dan membedakannya dengan fasilitas akomodasi lainnya sehingga industri pariwisata Sumatera Barat dapat terus berkembang.
2.	HOTEL KONTEMPORER DI YOGYAKARTA	Alfia Suci Rohmawati*	2018	IDENTIFIKASI PENDEKATAN REGIONALISME DALAM ARSITEKTUR HOTEL KONTEMPORER DI YOGYAKARTA	Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kedaerahan telah teridentifikasi dalam arsitektur hotel modern Yogyakarta. Sebanyak 5 dari 7 objek yang diamati menunjukkan kecenderungan ke arah pendekatan kedaerahan yang masih menitikberatkan pada pembentukan hubungan antara budaya dan sejarah. Pada saat yang sama, dua objek lainnya, Greenhost Hotel dan Grand Aston Hotel, keduanya menunjukkan sikap kedaerahan yang kritis,

					meskipun keduanya berfokus pada aspek nilai-nilai lokal yang berbeda. Desain Greenhost Hotel tampak fokus pada merespon iklim lokal, sedangkan Grand Aston Hotel fokus pada merespon koordinasi gedung dan lingkungan sekitarnya. Namun, karena keterbatasan data terkait konsep desain hotel-hotel tersebut, identifikasi tanda-tanda kedaerahan yang serius tidak dapat dijadikan acuan penilaian yang komprehensif.
3.	HOTEL SPA INTERNASIONAL	Shabrina Adani	2016	HOTEL SPA INTERNASIONAL DI BALI DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR REGIONALISME	Penerapan Arsitektur Regionalisme dalam Arsitektur Gedung Spa Hotel di Bali Untuk elemen fisik bangunan Gunakan metode regionalis Secara khusus. Masalah konstruksi Yang diselesaikan dengan regionalisme adalah Ruang, lokasi dan bentuk. rancangan Spa hotel unsur Filsafat segitiga populer
4.	ARSITEKTUR NUSANTARA	Maria I Hidayatun	2012	ARSITEKTUR NUSANTARA SEBAGAI DASAR PEMBENTUK REGIONALISME ARSITEKTUR INDONESIA	Regionalisme arsitektural merupakan konsep pembaharuan arsitektur nusantara yang dianggap tepat karena parameter dalam arsitektur nusantara sesuai dengan parameter dalam arsitektur kedaerahan. Dengan demikian, arsitektur nusantara menjadi dasar terbentuknya kedaerahan arsitektur Indonesia, dan tujuannya adalah untuk memperbarui arsitektur nusantara menjadi kekayaan dan kekuasaan yang sarat nilai dan makna. Tanpa nilai dan makna, arsitektur hanyalah artefak yang tidak berarti.
5.	ARSITEKTURAL APARTEMEN DI BALI	Hana Maliantha Gunawan	2017	KOMPONEN DESAIN ARSITEKTURAL APARTEMEN DI BALI BERDASARKAN PENDEKATAN REGIONALISME	Ditemukan dari analisis Di objek De Lagoon Residence Lihat lebih banyak komponen desain Sesuai dengan hubungan Lebih kuat dari Clío

				KRITIS	<p>Apartemen. Namun, ditemukan juga</p> <p>Studi kasus masih ada</p> <p>Kekurangan dalam keempat hubungan</p> <p>Fitur. Kekurangan bentuk</p> <p>Berdasarkan prinsip formal</p> <p>Bangunan tidak cocok</p> <p>Proporsi arsitektur tradisional Bali dan</p> <p>Jangan gunakan array</p> <p>paviliun</p>
--	--	--	--	--------	---

Tabel 1.5. Karya Tulis Desain Regionalisme

1.9 Sistematika Pembahasan

1. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan awalan atau lampiran dalam pembuatan laporan yang terdiri dari beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan data seluruh informasi yang terkait dengan penelitian.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Merupakan landasan dan teori yang berlaku dalam pembuatan laporan.

3. BAB III Objek dan Metode Perencanaan

Berisikan sasaran penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian baik dari sumber maupun narasumber yang berada di suatu lokasi amatan.

4. BAB IV Tinjauan Kawasan Perencanaan